



PUTUSAN

NOMOR 753/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata eCourt, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ratna Mangunsong, berkedudukan di Puri Aneka Jaya Blok D No.10 RT.001/RW.017, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bernad S. Erles Rarerai, S.H., M.H. dan Evy Susantie, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Pasopati & Associates beralamat di Jalan PLN Duren Tiga Raya Nomor 6A Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

Muchsin Alatas (direktur) PT. Menara Depok Asri Pengembang Apartemen Pesona Square, bertempat tinggal di Jalan Ir. H. Juanda No.99, Baktijaya, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 753/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Desember 2023 Nomor 753/PDT/2023/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili yang bersifat Relatif (Kompetensi Relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Register Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkar yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Depok diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 17 Oktober 2023, terhadap Pembanding semula Penggugat, melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Online Nomor 32/SRT.PDT.BDG.ONLINE/2023//PN Dpk Jo Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk pada tanggal 31 Oktober 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, Permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 753/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok;

Bahwa pernyataan permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat, telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara Elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 November 2023, Terbanding semula Tergugat tidak menyampaikan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat memutus, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Register Nomor Perkara 133/Pdt.G/2023/PN Dpk, tanggal 17 Oktober 2023;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, selanjutnya alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak diketemukan adanya hal-hal yang baru dan semua sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 753/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama karenanya, tidak perlu dipertimbangkan lagi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan dianggap telah termuat disini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk tanggal 17 Oktober 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang Pasal 118 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Dpk, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, yang terdiri dari Syafaruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua dan Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H. dan Yuli Heryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sri Yuditariani, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 753/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

TTD

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp.130.000,00 + |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).









Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



















Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)